

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).
- Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014).
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer*, (Jakarta: Salemba Infotek, 2012).

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Muhammad Yaumi, *Media dan Teknologi Pembelajaran*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Remy Syahdeini, Sutan, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2011).
- Rizky Aulia Cahyadi, *Apa yang Harus Ditanyakan kepada Ahli Digital Forensics? (Panduan bagi Praktisi Hukum)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021).
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2020).
- Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

JURNAL

- Akbar Kurnia Putra, “*Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional*”. Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
- Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyih Prakarsa, “*Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi*”. Journal of Criminal Law, Vol. 2 No. 2, Oktober 2021.
- Bisariyadi, “*Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi Role of Legal Expert in Constitutional Court’s Trial*”. Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No.4, Desember 2019.
- Dewi Bunga, “*Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime*”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 1, Maret 2019.

Muhammad Safri, Andi Softan, Winner Sitorus, *“Tindak Pidana Pengancaman Melalui Layanan Pesan Singkat”*, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 5, No. 1 (Juni 2016), ISSN: 2252-7230.

Petrus Reinhard Golose, *“Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri”*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4 No. 2, Agustus 2006.

Sy. Hasyim Azizurrahman, *“Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Era “Cyber””*. MMH, Jilid 41 No. 2, April 2012.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KONVENSI INTERNASIONAL

Convention on Cybercrime

MAKALAH

Dwi Sugiarto, *“Bukti Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”*, 2022.

Moh. Ali Yusron, Dadin Eka Saputra, Fathan Ansori, *“Analisis Hukum Pidana Terhadap Pornografi Online Berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, 2022.

Yudi Prayudi, Dedy Setyo Afrianto, “*Makalah Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*”, 16 Juni 2007 (SNATI 2007) ISSN: 1907-5022 Yogyakarta.

TESIS

Apreza Darul Putra, “*Pengaturan Penggeledahan dan Penyitaan Bukti Elektronik dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*” (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2013).

Philemon Ginting, “*Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*” (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

CERAMAH

Mujiono Hafidh Prasetyo, Kuliah Hukum Pidana IPTEK: “*Technology and Crime*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang, Mei, 2022).

WAWANCARA

Alfian Wahyu Pratama, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Mungkid, (Mungkid: 12 Januari, 2023).

LAMPIRAN

1. Permohonan Riset/Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : 889/UN7.F1/AK/XII/2022
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

12 DEC 2022

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
Jl. Sockarno Hatta No. 9 Kec. Mungkid, Kab. Magelang
Jawa Tengah 56511

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program SI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Nur Fitriana Kurniawati
NIM : 11000119120141
alamat : Gg. Nirwana Sari III No. 3d, RT.1/RW.1, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
nomor HP : 085701495358
bidang minat : Hukum Pidana
judul skripsi : Peran Hasil Pemeriksaan Forensik Ahli IT dalam Pembuktian Tindak Pidana Cyber (Studi Putusan Pengadilan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mkd)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



PtoL Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

2. Surat Jawaban Riset



PENGADILAN NEGERI MUNGKID KELAS IB

JL. SOEKARNO HATTA NO.9 TELP. (0293) 788254, FAX. (0293) 788308
Email : pn.mungkid@gmail.com, Website : pn-mungkid.go.id
Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 56511

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12.U35/ 640 /HK.04.01/II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : DARMINTO HUTASOIT.

Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nur Fitriana Kurniawati
NIM : 11000119120141
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro

Benar-benar telah melakukan magang di Kantor Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB di Kota Mungkid guna keperluan Melakukan Penelitian Skripsi dengan judul Peran Hasil PemeriksaanForensik Ahli IT dalam Pembuktian Tindak Pidana *Cyber* (Studi Putusan Pengadilan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mkd).

Yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 27 Januari 2022, dengan mendasarkan kepada Surat Permohonan Magang dari Universitas Diponegoro, Nomor : 889/UN7.F1/AK/XII/2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID



DARMINTO HUTASOIT